

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai sarana untuk menilai dan mengelola kinerja pemerintah daerah dan unit kerjanya secara keseluruhan. Peran utamanya adalah menyampaikan data keuangan kepada para pemangku kepentingan yang mengandalkan informasi ini untuk menginformasikan keputusan ekonomi, sosial, dan politik mereka. Menurut Kartoprawiro & Susanto (2018) untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, dibutuhkan pengelola keuangan yang kompeten dalam bidangnya. Meskipun demikian, sejumlah besar individu kesulitan memahami laporan keuangan. Kurangnya pemahaman ini dapat dibenarkan, mengingat latar belakang para pemangku kepentingan yang beragam. Pada kenyataannya, pihak-pihak ini kemungkinan besar memerlukan data keuangan ini untuk memandu pengambilan keputusan mereka, yang menyoroti perlunya analisis laporan keuangan.

Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban khusus daerah dalam lingkup pemerintahan daerah yang dapat dinyatakan dalam bentuk uang, termasuk semua jenis kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan pemerintah daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat di nilai dengan uang (Yulinchton et al., 2022), sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bab 1, Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005). Berlakunya otonomi daerah telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan, khususnya dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang saat ini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kinerja adalah kegiatan yang dapat diukur dari suatu badan usaha dalam kurun waktu tertentu, yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

Selain itu, pengukuran kinerja berfungsi sebagai tolak ukur finansial dan

nonfinansial atas tugas-tugas yang dilakukan dalam suatu organisasi, baik dari suatu kegiatan, proses, maupun unit. Mengukur kinerja berfungsi sebagai sarana akuntabilitas, suatu kewajiban yang perlu dipenuhi dan data yang diperoleh dari pengukuran kinerja dapat meningkatkan program-program mendatang (Yulinchton et al., 2022). Menurut Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut Yosephen (2023) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proporsi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam prespektif keutuhan negara bangsa. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam memajukan perekonomian daerah. Menurut Wardani (2020) melalui otonomi pemerintah daerah mendorong dan memotivasi masyarakat daerah untuk berinovasi sehingga dapat bersaing dengan daerah lain. Dengan diberlakukannya otonomi daerah sudah menjadi keharusan bagi pemerintah daerah untuk lebih mampu dalam memaksimalkan berbagai potensi yang dimiliki daerahnya. Sehingga permasalahan berangsur-angsur teratasi. Kebanyakan kota kecil di Indonesia masih belum cukup mandiri kinerja keuangannya. Kebanyakan pejabat daerah justru berbuat hal yang tidak seharusnya dengan melakukan macam-macam penyimpangan, yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat daerahnya (Ahmad & Munandar,

2022).

Kabupaten Batang Hari dipilih peneliti menjadi objek penelitian ialah karena, dapat dilihat dari letak geografisnya dimana Kabupaten Batang Hari adalah Kabupaten/Kota yang letaknya paling dekat dengan pusat Ibukota Provinsi Jambi dimana disini peneliti ingin melihat perkembangan suatu kabupaten yang berada paling dekat dengan Kota Jambi. Dalam hal ini Batang Hari sendiri memiliki potensi yang cukup melimpah dikarenakan terletak berdekatan dengan Kota Jambi dimana banyak pengusaha berinvestasi di Kabupaten Batang Hari melalui perusahaan Batu Bara, perkebunan kelapa sawit PTPN 6, sampai ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Kabupaten Batang Hari juga memiliki Universitas Islam Batang Hari Jambi (UNISBA) adanya universitas tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi warga sekitar kampus melalui pengadaan tempat tinggal berupa kos maupun rumah sewa, bukan hanya tempat tinggal, masyarakat sekitar juga dapat meningkatkan perekonomian melalui wisata kuliner, laundry dan lain-lain. Berikut merupakan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017-2023 :

**Tabel 1.1**  
**Realisasi APBD Kabupaten Batang Hari 2017-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>PAD</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>
2017	1.172.121.770.423	87.929.338.842	1.079.015.431.580	5.177.000.000
2018	1.199.729.789.613	98.808.531.271	1.059.635.938.341	41.285.320.000
2019	1.320.716.450.456	91.567.449.214	1.171.763.797.690	57.385.203.551
2020	1.197.376.863.504	104.230.889.087	1.048.622.185.574	44.523.788.842
2021	1.344.302.737.778	148.444.860.321	1.155.867.720.510	39.990.156.947
2022	1.266.293.731.043	107.138.940.714	1.121.152.332.749	38.002.457.580
2023	1.430.157.907.569	138.962.723.602	1.288.195.183.967	3.000.000.000

*Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 2017-2023 (data diolah, 2025)*

Terlihat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari di tahun 2017 hingga

tahun 2023 menyumbang sekitar 8,7% dari total pendapatan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Kabupaten Batang Hari masih luar biasa bersandar pada tunjangan Pemerintah Pusat. Dari data diatas juga dapat kita simpulkan bahwa PAD pada Kabupaten Batang Hari tergolong rendah. Faktor PAD suatu daerah dapat dinyatakan rendah atau bergantung terhadap Pemerintah Pusat salah satunya adalah belum sempurnanya pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam upaya mengoptimalkan penataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak yang harus digali suatu daerah.

**Tabel 1.2**  
**Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari 2017-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Belanja Daerah</b>
2017	790.623.440.030	206.581.778.664	1.173.410.766.968
2018	824.201.188.995	148.206.782.170	1.163.494.102.231
2019	888.705.927.249	251.118.803.752	1.341.856.186.750
2020	825.871.344.855	150.464.273.242	1.196.945.496.533
2021	830.142.096.168	177.304.084.037	1.253.599.608.461
2022	845.410.945.967	276.394.144.255	1.323.260.025.201
2023	870.443.585.308	460.388.684.904	1.529.752.614.250

*Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 2017-2023 (data diolah, 2025)*

Terlihat belanja Daerah Kabupaten Batang Hari dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dalam memenuhi kebutuhan Daerah yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan informasi prioritas belanja yang dapat berdampak pada kesejahteraan warganya dan memungkinkan daerah untuk mengatur keuangannya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Kabupaten Batang Hari masih memerlukan biaya yang besar dikarenakan belanja daerah terus mengalami peningkatan.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Batang Hari antara lain: (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi

sumber-sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan daerah, (3) kurangnya usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ada, (4) inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Penilaian kinerja keuangan untuk kepentingan umum merupakan sarana untuk menilai dan meningkatkan kinerja melalui perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu, penilaian kinerja keuangan juga menjadi standar untuk meningkatkan kinerja, khususnya terkait keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Dengan adanya otonomi daerah, sistem pemerintahan di Kabupaten Batang Hari telah mengalami desentralisasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang bertugas mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Laporan ini penting untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Batang Hari telah melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Penelitian ini sendiri berdasarkan penelitian yang dilangsungkan oleh Marsheela Putri (2024) tentang "*Analisis Kemampuan Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Muaro Jambi*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berada pada kategori sedang. Berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017, jumlah Pendapatan Umum Daerah tergolong rendah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong sangat rendah, sedangkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tergolong rendah. Dari sisi Realisasi Anggaran, Rasio Efektivitas Kabupaten Muaro Jambi dinilai sangat efektif. Selain itu, Rasio Aktivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengalokasikan porsi dana yang lebih besar untuk Belanja Aparatur dibandingkan dengan Belanja Publik. Selanjutnya, Rasio Keserasian Belanja Daerah menunjukkan bahwa lebih banyak dana yang dialokasikan untuk Belanja Langsung oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten

Muaro Jambi perlu ditingkatkan secara signifikan.

Berdasarkan pada saran peneliti terdahulu yang mengharapkan peneliti di masa mendatang untuk mengaplikasikan indikasi dalam kinerja keuangan daerah yang lain salah satunya efisiensi. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kinerja keuangan daerah melainkan juga menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Objek pada penelitian ini pun berbeda dari studi penelitian lebih dahulu dimana penelitian sebelumnya berobjek pada Kabupaten Muaro Jambi sedangkan penelitian ini berobjek pada Kabupaten Batang Hari. Variabel kemampuan keuangan sendiri dipilih mendampingi variabel kinerja dikarenakan menurut peneliti kemampuan serta kinerja keuangan tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan dimana analisis kemampuan keuangan berarti menganalisis seberapa besar kemampuan dari Pemerintah Daerah saat mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah menganalisis hasil kerja dari pemerintahan apakah telah sesuai berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah diputuskan sedari awal tahun. Maka ini dapat dikatakan pada hasil analisis akan menunjukkan apakah benar jika tingkat kemampuan keuangan yang tinggi juga hendak menunjukkan tingkat kinerja keuangan yang tinggi begitu pula sebaliknya jika tingkat kemampuan keuangan rendah juga akan menunjukkan tingkat kinerja keuangan yang rendah.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti terpicat untuk melangsungkan penelitian dengan judul **“Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, lantas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Batang Hari?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, lantas tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Batang Hari.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dihendaki bisa dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan mampu menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai kemampuan keuangan serta kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Batang Hari.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan bisa sebagai salah satu masukan dan pertimbangan dalam kemampuan keuangan maupun kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Batang Hari.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini dimaksudkan terampil sebagai bahan referensi serta juga perbandingan bagi peneliti lain pada bidang yang sama di masa mendatang.